

# ANALISIS KEMISKINAN RUMAH TANGGA NELAYAN DI DESA KUALA LANGSA KOTA LANGSA

Fiddini Alham<sup>1</sup>, Rozalina<sup>2</sup>, Dias Setianingsih<sup>2</sup>, Natasha<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

<sup>2</sup> Alumni Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Samudra

e-mail : [fiddini.alham@gmail.com](mailto:fiddini.alham@gmail.com)/[fiddinialham@unsam.ac.id](mailto:fiddinialham@unsam.ac.id)

## Abstract

Memasuki era SDGs 2015 (*Sustainable Development Goals*) yang menyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai point pertama prioritas disamping 16 tujuan lainnya. SDGs secara universal mendorong negara-negara untuk memobilisasi upaya mengakhiri semua bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Pada tahun 2017 Provinsi Aceh termiskin pertama di Pulau Sumatera, sedangkan ditahun 2016 menduduki Provinsi keduatermiskin setelah Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2017 penduduk miskin di Aceh mencapai 872ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,11 persen dan di daerah pedesaan sebesar 19,37 persen, dengan indeks gini 0,329. di Kota Langsa bagian pesisir yaitu Desa Kuala Langsa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Sebanyak 551 KK, hampir 95 persen berprofesi sebagai nelayan (berada digaris kemiskinan). Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan wilayah pedesaan terpusat di daerah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemiskinan rumah tangga nelayan dengan pendekatan pengeluaran pangan serta non pangan. Penelitian ini menggunakan metode survei di Desa Kuala Langsa. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Adapun jumlah informan yang telah diambil adalah sebanyak 30 orang nelayan. Responden dibatasi pada buruh nelayan. Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan Garis Kemiskinan (GK) nelayan di Kuala Langsa dikatakan berada pada garis kemiskinan, karena memiliki penghasilan kurang dari Rp. 319.172 per kapita per bulan. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK sebesar 71,43 persen. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah ikan yang memberi sumbangan sebesar 16,59 persen. Sayur memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (13,7 persen). Komoditi lainnya adalah beras (12,6 persen). Sementara itu komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, yaitu 17,7 persen.

Kata kunci : *Kemiskinan, Nelayan, Garis Kemiskinan, Pangan, Non Pangan.*

## PENDAHULUAN

### *Latar Belakang*

Memasuki era SDGs 2015 (*Sustainable Development Goals*) yang menyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai point pertama prioritas disamping

16 tujuan lainnya. SDGs secara universal mendorong negara-negara untuk memobilisasi upaya mengakhiri semua bentuk kemiskinan, memerangi ketidaksetaraan dan mengatasi perubahan iklim (UN, 2018).

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 1997). Pada tahun 2017 Provinsi Aceh termiskin pertama di Pulau Sumatera, sedangkan ditahun 2016 menduduki Provinsi keduatermiskin setelah Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2017 penduduk miskin di Aceh mencapai 872ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,11 persen dan di daerah pedesaan sebesar 19,37 persen, dengan indeks gini 0,329 (BPS, 2017).

Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (2013), diketahui bahwa hanya 2,2 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki kepala rumah tangga sebagai nelayan. Diartikan juga bahwa 5,6juta penduduk Indonesia yang kehidupannya bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan (Hamadi, 2013). Sedangkan di Kota Langsa bagian pesisir yaitu Desa Kuala Langsa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Sebanyak 551 KK, hampir 95 persen berprofesi sebagai nelayan (berada digaris kemiskinan). Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan wilayah pedesaan terpusat di daerah pesisir.

#### *Perumusan Masalah*

Dari survey yang dilakukan di Desa Kuala Langsa, nelayan belum sejahtera. Penelitian ini akan melihat

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Garis kemiskinan (GK) dapat dihitung dengan menjumlahkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sebelum menghitung GKM hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kelompok referensi yaitu 20% penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi

bagaimana kemiskinan dengan pendekatan pengeluaran pangan serta non pangan rumah tangga nelayan. penelitian ini dibatasi pada nelayan yang menggantungkan hidup mereka pada alam (laut). Penelitian ini penting untuk dilakukan, agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat bagi kesejahteraan nelayan.

#### *Tujuan Penelitian*

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kemiskinan rumah tangga nelayan dengan pendekatan pengeluaran pangan serta non pangan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode survei di Desa Kuala Langsa. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling. Adapun jumlah informan yang telah diambil adalah sebanyak 30 orang nelayan. Responden dibatasi pada buruh nelayan. Adapun alat analisis untuk melihat kemiskinan ini adalah.

$$GK = GKNM + GKM$$

Keterangan :

GK	=	Garis Kemiskinan
GKNM	=	Garis Kemiskinan Non Makanan
GKM	=	Garis Kemiskinan Makanan

umum IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Berdasarkan BPS diketahui bahwa IHK provinsi Aceh tahun 2017 Desember sebesar 125,77 dan IHK tahun 2018 Februari sebesar 126,80. GK Kota Langsa tahun 2017 sebesar Rp. 347.056/kapita.

Jadi, berdasarkan perhitungan GK nelayan di Kuala Langsa dikatakan miskin karena memiliki penghasilan kurang dari Rp. 319.172 per kapita per bulan. Dengan

memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK sebesar 71,43 persen. Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah ikan yang memberi sumbangan sebesar 16,59 persen. Sayur memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (13,7 persen). Komoditi lainnya adalah beras (12,6 persen). Sementara itu komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, yaitu 17,7 persen.

Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan Kota Langsa adalah sebesar Rp. 347.056 per kapita per bulan. Hal ini menandakan bahwa terjadi penurunan Garis Kemiskinan pada nelayan yang berada di Kota Langsa sebesar 8 persen. Dimana Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2017 sebesar 76,31 persen (72,48 persen di perkotaan dan 78,14 persen di pedesaan), sedangkan pada Maret 2017 sebesar 76,00 persen (BPS, 2017).

Pada September 2017, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya sama, seperti beras yang memberi sumbangan sebesar 16,84 persen di perkotaan dan 24,03 persen di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan (9,99 persen di perkotaan dan 10,08 persen di pedesaan). Komoditi lainnya adalah daging sapi (10,71 persen di perkotaan dan 6,40 persen di pedesaan).

Sementara itu komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan

terbesar terhadap Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan, yaitu 5,82 persen di perkotaan dan 4,93 persen di pedesaan. Berikutnya yaitu bensin (5,61 persen di perkotaan dan 4,95 persen di pedesaan) dan listrik (3,23 persen di perkotaan dan 1,72 persen di pedesaan) (BPS, 2017).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Gini Ratio Provinsi 2002-2017. [online], ([http://www.bps.go.id/link table dinamis/views/id/1116](http://www.bps.go.id/link/table/dinamis/views/id/1116) diakses 18 Februari 2018).
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan kebijakan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- [UN] United Nations. 2018. *The Sustainable Development Agenda*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/>.